



Hubungan Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar

Sapril^{1*}, Basri Bado², Diah Retno Dwi Hastuti³, Regina⁴, Muhammad Imam Ma'ruf⁵
¹²³⁴⁵Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email : sapril1722@gmail.com¹, basri.bado@unm.ac.id², diah.retno@unm.ac.id³,
regina@unm.ac.id⁴, muhhammadimammaruf@unm.ac.id⁵

Doi: <https://doi.org/10.37339/e-bis.v10i1.2914>

Diterbitkan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

ABSTRAK

Info Artikel

Diterima :
2025-12-12
Diperbaiki :
2026-01-22
Disetujui :
2026-01-23

Kata Kunci:

Efektivitas Anggaran;
Efisiensi Anggaran;
Pertumbuhan Ekonomi

Keywords:

Budget Effective
Ess; Budget Efficiency;
Economic Growth

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah karena mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kualitas anggaran belanja daerah, yang ditentukan oleh efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis korelasi kedua aspek tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dengan menggunakan data sekunder periode 2011-2024 dan uji korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran berada pada kategori cukup efektif, sementara efisiensi anggaran termasuk kategori sangat efisien. Uji korelasi menunjukkan bahwa efektivitas anggaran berkorelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ($r = 0,648$; $p = 0,012$), sedangkan efisiensi anggaran tidak menunjukkan korelasi signifikan ($r = 0,090$; $p = 0,759$).

ABSTRACT

Economic growth serves as a crucial indicator for evaluating regional development success, as it reflects a region's capacity to enhance production and societal welfare. One potential factor influencing economic growth is the quality of local government expenditure budgeting, determined by its effectiveness and efficiency in management. This study aims to analyze the correlation of these two aspects with the economic growth of Makassar City, utilizing secondary data from the period 2011–2024 and Spearman's rank correlation test. The findings reveal that budget effectiveness falls into the "fairly effective" category, while budget efficiency is classified as "very efficient." The correlation test indicates that budget effectiveness exhibits a positive and significant correlation with economic growth ($r = 0.648$; $p = 0.012$), whereas budget efficiency shows no significant correlation ($r = 0.090$; $p = 0.759$).

Alamat Korespondensi : Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 54311

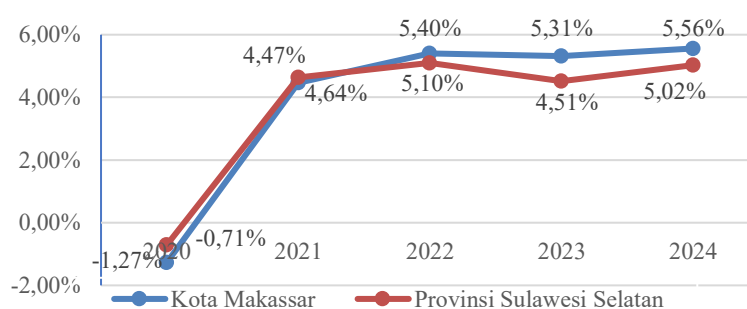
PENDAHULUAN

Pembangunan daerah juga tercermin dari kemajuan ekonominya, sehingga pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pembangunan tersebut. Pembangunan ekonomi mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara, yang biasanya diukur dari tingkat pendapatan per kapita (Hidayat & Nalle, 2017).

Dalam konteks makroekonomi, pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai penguatan output

per penduduk yang bersifat kontinu secara longitudinal. Dinamika pertumbuhan yang ekspansif umumnya dipandang sebagai indikator ketersediaan peluang strategis untuk mengoptimalkan kemakmuran publik secara agregat (Irasriadipura et al., 2023). Menurut Sukirno (2015) pertumbuhan ekonomi merupakan wujud dari intensifikasi kegiatan ekonomi yang bermuara pada bertambahnya pasokan komoditas dan layanan di tengah masyarakat, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai episentrum ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar memegang peranan krusial sebagai penggerak utama dalam mendorong aktivitas ekonomi regional. Sebagai pusat perdagangan, jasa, logistik, dan pemerintahan, Kota Makassar berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi sangat signifikan, sehingga setiap perubahan ekonomi di Kota Makassar berdampak langsung pada kondisi ekonomi wilayah sekitarnya.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: BPS Kota Makassar, 2025

Pada gambar 1 menyajikan fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang disandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dalam rentang tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, kedua wilayah mengalami kontraksi akibat pandemi, dengan Makassar tumbuh -1,70% dan Sulawesi Selatan -0,71%. Namun, sejak 2021 pemulihan terjadi sangat cepat, ditandai dengan pertumbuhan positif di atas 4% dan terus meningkat pada 2022. Meskipun pada 2023 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perlambatan, Kota Makassar tetap menunjukkan kinerja lebih baik. Hingga tahun 2024, Makassar konsisten mencatat pertumbuhan di atas provinsi, menggambarkan pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta peran strategisnya sebagai pusat kegiatan ekonomi regional.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah dan pendapatan asli daerah. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang digunakan untuk mengatur perekonomian melalui penetapan alokasi belanja setiap tahun. Pengeluaran ini tercermin dalam dokumen APBD (T. Naukoko et al., 2023).

Dalam struktur PDRB, pengeluaran pemerintah merupakan determinan krusial yang bersinergi dengan konsumsi masyarakat, pembentukan modal (investasi), serta perdagangan luar negeri (ekspor neto) dalam menstimulasi akselerasi ekonomi (Hidayat & Nalle, 2017). Berdasarkan perspektif aliran Keynesian, belanja pemerintah berperan dalam mendorong peningkatan permintaan agregat atas barang dan jasa berfungsi sebagai katalis utama dalam mendorong ekspansi ekonomi secara menyeluruh. Pandangan ini menekankan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan merangsang aktivitas ekonomi secara menyeluruh, sehingga

berdampak pada peningkatan output agregat. Dengan demikian, belanja pemerintah dipandang sebagai faktor eksogen yang secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Hutahaean, 2019).

Kota Makassar dalam lima tahun terakhir telah mengalokasikan belanja daerah dalam jumlah yang cukup signifikan. Alokasi ini mencakup belanja operasional, belanja modal, dan belanja lainnya yang dirancang untuk mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas ekonomi daerah. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah kota dalam memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Makassar
Periode 2020-2024 (Miliar Rupiah)

| Tahun | Anggaran Belanja Daerah | Realisasi Belanja Daerah | Persen (%) |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 2020 | 3.708,15 | 2.969,78 | 80,11 |
| 2021 | 4.165,16 | 3.150,49 | 75,64 |
| 2022 | 4.700,69 | 3.549,06 | 75,50 |
| 2023 | 5.262,23 | 4.507,72 | 85,66 |
| 2024 | 5.291,66 | 4.268,79 | 80,67 |

Sumber: BPKAD Kota Makassar (Data diolah, 2025)

Perkembangan postur belanja daerah Kota Makassar dalam rentang tahun 2020-2024, berdasarkan data anggaran dan realisasinya menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan fiskal daerah. Aktualisasi penyerapan belanja daerah pada tahun 2020 terakumulasi di angka Rp2,96 triliun dari anggaran Rp3,70 triliun, atau 80 persen, yang mencerminkan penurunan aktivitas belanja akibat dampak pandemi COVID-19. Mulai tahun 2021 hingga 2023, anggaran dan realisasi belanja menunjukkan tren peningkatan seiring pemulihan ekonomi, meskipun tingkat realisasi pada 2021 dan 2022 masih berada pada angka 76 persen. Kinerja terbaik terjadi pada 2023 ketika anggaran mencapai Rp5,26 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,51 triliun atau 86 persen, menandakan peningkatan efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Pada 2024, anggaran kembali meningkat menjadi Rp5,29 triliun, namun capaian realisasi sedikit menurun menjadi 81 persen. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan upaya pemerintah Kota Makassar dalam memperbaiki kinerja belanja daerah meskipun masih menghadapi variasi efektivitas antar tahun.

Efektivitas pengelolaan anggaran daerah terlihat dari kedekatan realisasi belanja selaras dengan parameter yang telah dikonseptualisasikan sebelumnya. Efisiensi tercermin dalam kapabilitas pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik. Realisasi belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran akan menciptakan efek multiplier yang positif bagi perekonomian daerah

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah pusat maupun daerah dengan cara mengurangi alokasi anggaran pada kegiatan yang dianggap tidak prioritas, seperti perjalanan dinas, honorarium yang tidak menghasilkan output terukur, kursus atau bimbingan teknis berulang, serta belanja sewa yang dapat dioptimalkan.

Tabel 2. Realisasi Pos Belanja Daerah Kota Makassar yang Terdampak Efisiensi
Tahun 2025 Periode 2020-2023 (Juta Rupiah)

| Belanja Daerah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Honorarium PNS | 16,119,97 | 21,084,31 | 27,193,56 | 28,714,40 |
| Belanja Bahan Habis Pakai | 53,666,54 | 239,594,79 | 321,380,14 | 395,846,02 |

| Belanja Daerah | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Belanja Jasa Kantor | 624,315,26 | 633,172,68 | 656,701,23 | 749,888,29 |
| Belanja Sewa Gedung | 2,099,256 | 3,305,20 | 10,763,11 | 18,718,63 |
| Belanja Sewa Peralatan | 7,965,26 | 18,897,95 | 32,295,05 | 56,953,47 |
| Belanja Perjalanan Dinas | 40,385,96 | 98,687,24 | 175,498,97 | 238,070,77 |
| Belanja Kursus, Bimtek | 3,052,70 | 7,458,77 | 16,265,63 | 24,305,56 |
| Belanja Pemeliharaan | 15,069,98 | 19,661,19 | 36,135,93 | 43,760,71 |
| Total | 762,676,938 | 1,041,864,148 | 1,276,235,630 | 1,556,259,863 |

Sumber: BPKAD Kota Makassar (Data diolah, 2025)

Jika dibandingkan dengan data belanja daerah Kota Makassar tahun 2020-2023, terlihat bahwa beberapa pos belanja justru mengalami peningkatan signifikan, seperti perjalanan dinas yang melonjak dari Rp40 miliar pada 2019 menjadi Rp238 miliar pada 2023, serta belanja bahan habis pakai dan jasa kantor yang terus membesar secara progresif. Dinamika ini merefleksikan adanya progresivitas untuk melakukan efisiensi agar sejalan dengan kebijakan nasional.

Efisiensi belanja dapat dilakukan dengan menekan biaya perjalanan dinas hingga 50% sesuai arahan Inpres, memperketat pemberian honorarium tambahan hanya pada kegiatan yang benar-benar produktif, serta mengoptimalkan pelatihan melalui metode daring agar lebih hemat biaya. Selain itu, belanja sewa gedung dan peralatan dapat diminimalisir melalui pemanfaatan aset pemerintah yang sudah ada, sementara belanja pemeliharaan tetap dijalankan secara terukur karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan layanan publik.

Belanja negara berkualitas diukur melalui tiga kriteria pokok: keberlanjutan, efisiensi, dan efektivitas. Belanja dianggap berkelanjutan jika sejalan dengan kerangka makroekonomi jangka menengah serta mendukung strategi fiskal yang lestari dalam jangka panjang. Efisiensi tercermin dari kemampuan anggaran mencapai target pembangunan tanpa pemborosan, sementara efektivitas difokuskan pada pencapaian *outcome* program yang berdampak riil bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Hutahaean, 2019).

Konsep efisiensi berakar pada teori ekonomi mikro Adam Smith, khususnya teori produsen dan konsumen. Dalam perspektif ekonomi mikro, jika produsen berorientasi pada pencapaian keuntungan maksimum dengan pengeluaran minimum, maka teori konsumen menekankan upaya memaksimalkan utilitas atau tingkat kepuasan yang diperoleh (Ramadani & Arfida, 2017).

Efektivitas anggaran mencerminkan sejauh mana realisasi anggaran dapat mencapai target dan sasaran program pembangunan yang telah direncanakan. Sementara itu, efisiensi anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal, dengan biaya serendah mungkin untuk menghasilkan output yang maksimal. Kedua aspek ini saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja fiskal pemerintah daerah (Lutfi et al., 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji dampak efektivitas dan efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2020) menemukan bahwa variabel efisiensi anggaran yang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB, menandakan bahwa pengelolaan fiskal yang efisien berkontribusi langsung pada penguatan struktur ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2017) menemukan bahwa Jawa Barat dan Sumatera Utara skor efisiensi belanja pemerintah daerah berkorelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, semakin besar skor efisiensi belanja pemerintah daerah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Juli

et al., 2025) menunjukkan bahwa variabel efisiensi belanja modal menjadi determinan positif yang signifikan bagi pertumbuhan wilayah. Hal ini merefleksikan bahwa prudensi fiskal dalam investasi publik mampu menciptakan *multiplier effect* yang mendorong produktivitas dan memperkuat kapasitas ekonomi regional secara berkelanjutan. penelitian yang dilakukan oleh (Rumbia et al., 2022) hasil penelitian menunjukkan peningkatan realisasi belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran terbukti memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran berperan penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi, karena belanja pemerintah yang efektif dan efisien mampu mendorong aktivitas produksi, investasi, dan pelayanan publik. Dalam konteks Kota Makassar, dinamika pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang serta besarnya peran kota Makassar sebagai pusat kegiatan regional menuntut pengelolaan anggaran yang semakin optimal. Selain itu, tantangan pascapandemi membuat kebutuhan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi belanja daerah menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana efektivitas dan efisiensi anggaran berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dan sebagai dasar peningkatan kebijakan fiskal daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2015) Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai peningkatan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan volume output barang dan jasa guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan penduduk. Berdasarkan perspektif Kuznets, inti dari pertumbuhan ekonomi terletak pada peningkatan kapabilitas jangka panjang sebuah negara guna memproduksi dan mendistribusikan variasi barang ekonomi yang lebih luas (Wau et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi merupakan representasi dari penguatan aktivitas produktif yang mampu menciptakan nilai tambah riil melalui penyediaan komoditas dan layanan publik yang lebih luas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat diukur melalui ekspansi nilai PDB dan PNB, terlepas dari tinggi atau rendahnya akselerasi kenaikan yang terjadi dibandingkan pertumbuhan penduduk maupun perubahan struktur ekonomi. Adapun Teori tentang pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut (Ismail, 2012):

Adam Smith

Adam Smith menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh keberfungsian mekanisme pasar bebas. Melalui koordinasi harga dan insentif keuntungan, pasar mendorong alokasi sumber daya yang efisien, sehingga memungkinkan terciptanya kinerja ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Orientasi perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa demi memperoleh laba semakin menguatkan dinamika pasar: proses jual-beli bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga memacu pelaku usaha untuk terus mencari cara-cara produksi yang lebih unggul.

Di sisi lain, perluasan pasar membuka ruang bagi spesialisasi kegiatan ekonomi. Semakin luas jangkauan pasar, semakin dalam pembagian kerja, sehingga setiap pelaku dapat memfokuskan diri pada bidang yang paling dikuasai. Spesialisasi ini, menurut Smith, berinteraksi erat dengan kemajuan teknologi: ketika proses produksi makin terspesialisasi, inovasi teknik pun terdorong, produktivitas meningkat, dan pendapatan pekerja naik. Kenaikan pendapatan tersebut kemudian memperluas permintaan di pasar, menciptakan lingkaran pertumbuhan yang saling memperkuat antara produktivitas, pendapatan, dan ekspansi pasar.

Harrod-Domar

Sebagai pelengkap atas pemikiran Keynes, model Harrod-Domar mengelaborasi lebih lanjut variabel-variabel yang memengaruhi stabilitas dan determinasi kegiatan ekonomi dalam jangka panjang. Jika teori Keynes menekankan bahwa tingkat pendapatan nasional ditentukan oleh besarnya pengeluaran agregat, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan, maka teori Harrod-Domar menambahkan dimensi jangka panjang terhadap dampak investasi tersebut. Dalam kerangka Keynesian, investasi dipandang sebagai komponen penting yang secara langsung memengaruhi permintaan agregat dan pendapatan nasional.

permintaan agregat pada periode berjalan, sekaligus bertindak sebagai instrumen akumulasi stok modal yang memperluas kapasitas produksi potensial di masa depan. Oleh karena itu, agar seluruh kapasitas tambahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, permintaan agregat di masa depan harus tumbuh seiring dengan peningkatan kapasitas tersebut. Dengan kata lain, pertumbuhan permintaan agregat harus seimbang dengan pertumbuhan kapasitas produksi agar tidak terjadi pengangguran sumber daya atau kelebihan kapasitas. Maka dari itu, teori Harrod-Domar menekankan pentingnya laju pertumbuhan ekonomi yang stabil untuk menjamin pemanfaatan penuh terhadap modal hasil dari investasi sebelumnya.

Aliran Keynes

Perspektif Keynesian menegaskan bahwa intervensi otoritas publik merupakan determinan utama dalam mengoptimalkan capaian pembangunan ekonomi. Implikasi fundamental dari teori ini menekankan urgensi peran aktif pemerintah melalui orkestrasi kebijakan moneter, seperti manipulasi suku bunga dan pengendalian likuiditas, serta kebijakan fiskal melalui manajemen perpajakan dan alokasi belanja publik untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi (Azwar, 2016).

Menurut Keynes, kondisi makroekonomi suatu perekonomian ditentukan oleh dinamika permintaan agregat masyarakat. Apabila terjadi diskrepansi di mana permintaan agregat melampaui kapasitas penawaran agregat dalam suatu periode, akan muncul kondisi defisit output yang menjadi katalis bagi eskalasi volume produksi, tingkat harga, atau kombinasi keduanya pada periode mendatang. Sebaliknya, ketika permintaan agregat berada di bawah ambang penawaran agregat, perekonomian akan mengalami surplus produksi atau akumulasi stok yang tidak terencana, sehingga output atau harga atau keduanya akan menurun pada periode selanjutnya. Inti dari kebijakan makroekonomi Keynes terletak pada upaya pemerintah untuk memengaruhi permintaan agregat guna mendekatkan perekonomian pada kondisi kesempatan kerja penuh (*full employment*).

Permintaan agregat dikonseptualisasikan sebagai akumulasi pengeluaran riil dari seluruh agen ekonomi untuk mengonsumsi barang dan jasa dalam rentang waktu satu tahun fiskal. Dalam konteks perekonomian tertutup, struktur permintaan agregat ini diartikulasikan melalui tiga komponen fundamental.

Intervensi pemerintah terhadap totalitas permintaan dalam perekonomian dimanifestasikan melalui kebijakan pengeluaran publik secara langsung, serta stimulasi terhadap sektor konsumsi dan investasi secara tidak langsung. Komposisi agregat tersebut secara matematis diturunkan dari sinergi antara konsumsi masyarakat (C), alokasi modal swasta (I), dan belanja negara (G).

$$Z = C+I+G$$

Masing-masing pilar permintaan agregat berfluktuasi berdasarkan parameter deterministik yang unik, yang merefleksikan kompleksitas hubungan antara perilaku pelaku ekonomi dan kondisi pasar. Konsumsi rumah tangga terutama dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diterima serta kecenderungan masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya atau *marginal propensity to consume* (MPC). Sementara itu, pengeluaran investasi ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diharapkan (*marginal efficiency of capital*) dan biaya penggunaan dana yang tercermin dari tingkat suku bunga. Pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh proses politik dan kebijakan publik yang kompleks, sehingga dalam analisis makroekonomi umumnya diperlakukan sebagai variabel eksogen. Perubahan pada masing-masing komponen permintaan agregat tersebut baik konsumsi, investasi, maupun pengeluaran pemerintah akan memengaruhi tingkat permintaan agregat melalui mekanisme berantai yang dikenal sebagai efek pengganda (*multiplier effect*). Dengan demikian, peningkatan salah satu komponen sebesar Rp1 akan mendorong kenaikan permintaan agregat lebih dari Rp1, di mana besarnya pengganda tersebut bergantung pada nilai MPC.)

J.E. Meade

Profesor J.E. Meade dari Universitas Cambridge memformulasikan sebuah model pertumbuhan ekonomi yang mengadopsi kerangka paradigma neoklasik. Konstruksi teoretis ini diorientasikan untuk mengelaborasi perilaku sistem ekonomi yang sederhana dalam proses pertumbuhan menuju kondisi keseimbangan (*equilibrium growth*). Model ini dirancang sebagai penyempurnaan dari pendekatan klasik, dengan memberikan perhatian pada dinamika pertumbuhan jangka panjang.

Menurut Meade, eskalasi pertumbuhan ekonomi secara fundamental diterminasi oleh dua variabel krusial, yaitu peningkatan jumlah tenaga kerja dan proses akumulasi modal. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi dalam memperbesar kapasitas produksi perekonomian. Pertumbuhan penduduk akan mendorong bertambahnya pasokan tenaga kerja, sedangkan kegiatan investasi berperan dalam meningkatkan stok modal. Lebih lanjut, Meade menekankan bahwa keberlangsungan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh terciptanya keseimbangan antara laju pertumbuhan tenaga kerja, akumulasi modal, dan perkembangan teknologi yang meningkatkan efisiensi produksi (Haryono et al., 2021).

Solow

Ekonom Robert M. Solow mengonstruksi sebuah model pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mengelaborasi pengaruh akumulasi tabungan, dinamika demografi, dan akselerasi teknologis sebagai variabel determinan dalam menetapkan level output serta trajektori pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam kerangka model Solow, ketiga faktor tersebut khususnya perkembangan teknologi dipandang sebagai determinan utama pertumbuhan output jangka panjang. Model ini menekankan pentingnya efisiensi produksi dan akumulasi modal sebagai fondasi dalam proses pembangunan ekonomi.

Solow menegaskan bahwa dengan adanya koefisien teknik yang bersifat variabel (tidak tetap seperti dalam model Harrod-Domar), maka rasio antara modal dan tenaga kerja (kapital-intensitas) akan cenderung menyesuaikan secara bertahap menuju rasio keseimbangan (*steady state*). Jika pada suatu waktu rasio modal terhadap tenaga kerja terlalu tinggi, maka pertumbuhan modal dan output akan melambat dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja, sehingga rasio tersebut menurun. Sebaliknya, jika rasio tersebut terlalu rendah, maka pertumbuhan modal akan lebih cepat daripada tenaga kerja. Dengan demikian, model Solow menggambarkan adanya kecenderungan alami sistem ekonomi untuk mencapai keseimbangan jangka panjang yang stabil melalui mekanisme penyesuaian antar faktor produksi (Sinaga et al., 2024).

Kinerja Keuangan

Menurut Mardiasmo (2017) Kinerja keuangan pada organisasi sektor publik menggambarkan tingkat pencapaian dan pertanggungjawaban organisasi beserta manajemennya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas sebagai salah satu pilar utama dalam penerapan *good governance* tidak hanya berfokus pada pelaporan penggunaan dana publik, tetapi juga menekankan bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Kinerja keuangan menggambarkan tingkat keberhasilan suatu entitas yang diukur melalui berbagai indikator keuangan. Evaluasi kinerja keuangan bertujuan menilai hasil yang telah dicapai pada periode sebelumnya dengan menggunakan metode analisis tertentu untuk memperoleh gambaran kondisi keuangan secara menyeluruh. Selain itu, analisis ini juga berperan dalam mengidentifikasi potensi kinerja keuangan yang dapat dipertahankan atau ditingkatkan dalam proyeksi periode berikutnya. Dalam konteks pemerintah daerah, kinerja keuangan dapat dinilai melalui indikator-indikator keuangan daerah, salah satunya dengan menerapkan analisis rasio keuangan. Melalui pendekatan ini, tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui. Akuntabilitas tidak semata-mata diukur dari besarnya dana publik yang dibelanjakan, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut dikelola secara efisien, efektif, dan ekonomis (Kartika, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merepresentasikan manifestasi output dari implementasi program dan aktivitas yang didanai melalui anggaran publik, yang mencakup dimensi kuantitatif dan kualitatif yang terukur. Kapabilitas otoritas daerah dalam konteks ini tercermin dari efisiensi penyediaan layanan publik. Sebagai entitas pemegang mandat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah daerah memiliki obligasi untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban sebagai instrumen transparansi pengelolaan sumber daya masyarakat, di mana analisis rasio terhadap realisasi APBD menjadi basis fundamental dalam mengevaluasi efektivitas finansial tersebut (Suhaedi, 2019).

Belanja Daerah

Secara teknis, belanja daerah mencakup seluruh transaksi yang memitigasi posisi saldo anggaran daerah tanpa adanya mekanisme restitusional atau pengembalian dana. Manifestasi dari kebijakan belanja ini dieksekusi melalui kas umum daerah untuk mendanai kewajiban pemerintah selama satu tahun anggaran berjalan (Tuju et al., 2022). Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengelola aktivitas belanja pemerintah, sekaligus sebagai panduan dalam memperoleh pendapatan dan pembiayaan. Pada umumnya, anggaran disusun untuk satu periode tahunan. Namun, dalam kondisi tertentu, anggaran dapat direncanakan pada rentang waktu jangka pendek yang bersifat temporer maupun jangka panjang yang bersifat berkelanjutan (Suhaedi, 2019).

Aliran Keynesian memandang belanja pemerintah sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan ini, peningkatan pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat terhadap barang dan jasa dalam perekonomian, sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka ini, belanja pemerintah diperlakukan sebagai variabel eksogen yang memengaruhi output agregat, ekspansi ekonomi dikonseptualisasikan sebagai konsekuensi logis dari eskalasi belanja publik. Sebaliknya, Hukum Wagner atau *law of expanding public activity* menegaskan eskalasi output nasional diidentifikasi sebagai katalisator utama bagi pengembangan sektor publik. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dipandang sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai penyebab utamanya.

Anggaran

Menurut Sukarno (2009), anggaran merupakan artikulasi rencana strategis yang diformulasikan secara sistematis dan menyeluruh, serta dipresentasikan dalam denominasi moneter sebagai standar pengukuran nilai ekonomi, serta mencakup kegiatan operasional dan penggunaan sumber daya organisasi untuk periode tertentu di masa depan. Anggaran memuat proyeksi pengeluaran, penerimaan, maupun laba yang direncanakan. Selain itu, anggaran juga mencerminkan tujuan, rencana, dan program organisasi yang dituangkan dalam bentuk angka, yang selanjutnya berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai pelaksanaan rencana pada periode berikutnya.

Anggaran diposisikan sebagai artikulasi rencana tertulis yang mempresentasikan aktivitas organisasi melalui parameter kuantitatif dalam rentang waktu yang ditetapkan. Secara substansial, anggaran merefleksikan formulasi rencana yang disusun secara sistematis dan holistik, mencakup seluruh spektrum fungsional entitas dalam denominasi moneter untuk periode prospektif (Milenia et al., 2022). Anggaran diposisikan sebagai instrumen direktif yang krusial dalam arsitektur pengendalian manajerial, terutama dalam mengintegrasikan fungsi perencanaan strategis dan mekanisme pengawasan. Dokumen ini mempresentasikan manifestasi rencana operasional organisasi dalam cakrawala temporal jangka pendek, yang diartikulasikan melalui parameter kuantitatif yang terukur (Ayu & Yulistia 2020).

Efektivitas

Efektivitas merupakan terminologi yang merefleksikan derajat keberhasilan suatu entitas dalam mengaktualisasikan sasaran strategis yang telah diprogramkan. Konsep ini menitikberatkan pada konvergensi antara proyeksi rencana dengan realisasi output, di mana pencapaian target

tersebut menjadi indikator fundamental atas keberhasilan implementasi agenda organisasi (Khaira et al., 2022).

Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas merepresentasikan metrik keberhasilan sebuah entitas dalam mengaktualisasikan sasaran strategis yang telah diprogramkan. Sebuah organisasi memperoleh predikat efektif apabila menunjukkan kapabilitas dalam memanifestasikan tujuan-tujuan tersebut menjadi capaian nyata. Indikator efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil (*outcome*) yang dihasilkan dari keluaran (*output*) suatu program berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan. Semakin besar peran output dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas pelaksanaan proses kerja dalam suatu unit organisasi.

Penilaian efektivitas anggaran bertumpu pada analisis perbandingan antara realisasi belanja dengan target manajerial yang telah ditetapkan. Eskalasi dalam capaian realisasi yang mendekati atau memenuhi target perencanaan menunjukkan aksentuasi efektivitas yang lebih optimal dalam penggunaan sumber daya keuangan, maka hal tersebut menunjukkan semakin baik efektivitas kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan. Selanjutnya, berikut disajikan rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas anggaran belanja.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja}{Anggaran\ Belanja} \times 100\%$$

Pencapaian efektivitas belanja daerah diukur melalui kepatuhan terhadap parameter yang digariskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996. Instrumen regulasi tersebut menetapkan klasifikasi derajat efektivitas berdasarkan ambang batas (*threshold*) sebagai berikut:

1. Nilai di atas 100 persen dikategorikan sangat efektif.
2. Nilai antara 91 persen hingga 100 persen dikategorikan efektif.
3. Nilai antara 81 persen hingga 90 persen dikategorikan cukup efektif.
4. Nilai antara 61 persen hingga 80 persen dikategorikan kurang efektif.
5. Nilai di bawah 60 persen dikategorikan tidak efektif.

Efisiensi

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, efisiensi didefinisikan sebagai hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Efisiensi menunjukkan sejauh mana barang dan jasa yang diperoleh serta digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan manfaat yang diharapkan.

Konstruksi konsep efisiensi memiliki landasan epistemologis yang berakar kuat pada disiplin ekonomi mikro, terutama dalam kerangka teoretis perilaku produsen dan perilaku konsumen. Dalam teori produsen, pelaku usaha diasumsikan berupaya memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan biaya produksi. Sementara itu, teori konsumen menjelaskan bahwa individu cenderung memaksimalkan utilitas atau tingkat kepuasan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Ramadani & Arfida, 2017).

Secara umum, efisiensi dapat dipahami sebagai upaya untuk meminimalkan pemborosan dalam penggunaan sumber daya. Dalam setiap kegiatan yang ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, penerapan efisiensi menjadi sangat penting agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat dan optimal. Melalui efisiensi, pemanfaatan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tujuan dapat dicapai secara lebih efektif tanpa pemborosan. Efisiensi merefleksikan korelasi fungsional antara hasil produksi (*output*) berupa barang dan jasa dengan alokasi sumber daya (*input*) yang dikonsumsi. Sebuah entitas atau program dikualifikasikan sebagai efisien apabila mampu mengaktualisasikan target output melalui pemanfaatan input yang paling minimal, atau sebaliknya, mencapai eskalasi output yang optimal dalam batasan sumber daya yang tersedia (Khaira et al., 2022).

Derajat efisiensi diukur melalui komparasi fungsional antara input dan output dalam siklus operasional organisasi. Dalam ranah tata kelola keuangan daerah, parameter efisiensi dievaluasi dengan membandingkan aktualisasi belanja langsung terhadap agregat realisasi belanja secara keseluruhan. Formulasi matematis yang diimplementasikan untuk mengukur tingkat efisiensi tersebut dipaparkan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Langsung}{Realisasi\ Belanja} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria penilaian tingkat efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut:

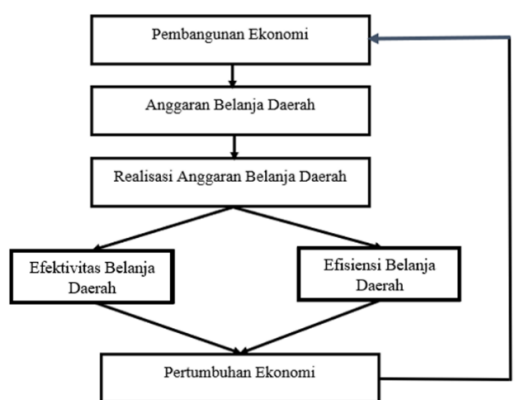
1. Nilai lebih dari 100% menunjukkan anggaran belanja tidak efisien.
2. Nilai antara 90% hingga 100% menunjukkan anggaran belanja kurang efisien.
3. Nilai antara 80% hingga 90% menunjukkan anggaran belanja cukup efisien.
4. Nilai antara 60% hingga 80% menunjukkan anggaran belanja efisien.
5. Nilai di bawah 60% menunjukkan anggaran belanja sangat efisien

Kerangka Penelitian

Pembangunan ekonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan output dan pendapatan regional, yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas sektor swasta, tetapi juga oleh peran pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal, khususnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam perspektif Keynesian, belanja pemerintah berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong permintaan agregat sehingga dapat meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi, asalkan dikelola secara tepat dan berkualitas. Efektivitas anggaran menunjukkan sejauh mana realisasi belanja daerah mampu mencapai target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas menekankan pada tingkat keberhasilan pencapaian tujuan tanpa memperhatikan besarnya sumber daya yang digunakan. Belanja daerah yang direalisasikan sesuai perencanaan dan diarahkan pada program prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, akan menghasilkan output dan outcome yang mendorong aktivitas ekonomi. Penelitian (Sajow et al., 2017) membuktikan bahwa peningkatan efektivitas belanja daerah berkaitan dengan perbaikan kinerja pembangunan, sehingga efektivitas anggaran berpotensi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Efisiensi anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Berdasarkan teori ekonomi mikro, efisiensi tercapai ketika output maksimum dihasilkan dengan penggunaan input seminimal mungkin (Ramadani & Arfida, 2017). Sementara itu, berdasarkan teori Keynes, pengeluaran pemerintah, termasuk belanja daerah, dapat memengaruhi tingkat permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Efisiensi anggaran tercapai apabila setiap unit dana yang dikeluarkan dapat memaksimalkan dampaknya terhadap output ekonomi tanpa menimbulkan pemborosan. Dalam konteks teori Keynes, pengelolaan anggaran yang efisien pada sektor produktif dan belanja modal dapat meningkatkan investasi, konsumsi, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun menengah. Hasil penelitian (Andriani, 2017), dan (Putra, 2020), menunjukkan bahwa efisiensi belanja pemerintah, terutama belanja produktif dan belanja modal, memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Efektivitas dan efisiensi anggaran merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam pengelolaan belanja daerah. Efektivitas berfokus pada pencapaian target pembangunan, sedangkan efisiensi menekankan pada optimalisasi penggunaan sumber daya. Dalam konteks Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, pengelolaan APBD yang efektif dan efisien diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah sebagai variabel independen yang diduga memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.



Gambar 2. Kerangka Pikir

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data sekunder yang digunakan berupa data deret waktu dengan periode pengamatan tahun 2011-2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara dua variabel independen, yaitu efektivitas dan efisiensi anggaran, terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Dengan menggunakan korelasi Rank Spearman

Uji Korelasi Spearman digunakan untuk menganalisis hubungan linear antara dua variabel atau lebih berskala ordinal. Koefisien korelasi Spearman merupakan statistik non-parametrik, yang digunakan ketika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal. Kekuatan dan arah hubungan (korelasi) antara variabel akan bermakna jika hubungan tersebut signifikan secara statistik. Suatu

hubungan dianggap signifikan apabila nilai signifikansi hasil perhitungan kurang dari 0,05 atau 0,01. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 0,01, maka hubungan antara variabel dianggap tidak signifikan atau tidak bermakna. Untuk menganalisis korelasi Spearman dalam statistik uji menggunakan rumus :

$$r_s = \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

r_s = Nilai Korelasi Spearman

d = Selisih peringkat antara X dan Y

n = Jumlah pasangan (data)

Prosedur Uji Hipotesis:

H0: Variabel X dan Y saling bebas (tidak berkorelasi)

H1: Variabel X dan Y tidak saling bebas (berkorelasi)

Interpretasi hasil penelitian korelasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kriteria interpretasi koefisien korelasi dapat dibagi ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan penilaian kekuatan hubungan antar variabel. Nilai korelasi antara 0,00 hingga 0,199 menunjukkan hubungan yang sangat rendah, sedangkan korelasi 0,22 hingga 0,399 dikategorikan sebagai hubungan rendah. Apabila nilai korelasi berada pada rentang 0,40 hingga 0,599, maka hubungan tersebut dianggap cukup kuat. Selanjutnya, nilai antara 0,60 hingga 0,799 menunjukkan hubungan yang kuat, dan korelasi dalam rentang 0,80 hingga 1,000 mencerminkan hubungan yang sangat kuat. Kategori ini membantu memahami sejauh mana variabel-variabel dalam penelitian saling berpengaruh atau berkaitan secara statistik

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pada tabel 4.1 anggaran belanja Kota Makassar selama periode 2011-2024, diperoleh rata-rata rasio efektivitas sebesar 85,7 persen, yang secara umum tergolong dalam kategori cukup efektif. Merujuk pada laporan realisasi anggaran 2011-2013, tingkat efektivitas berada pada kisaran 91,25 hingga 95,35 persen, yang berarti efektif. Hal tersebut mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik, ditandai dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, yang didorong oleh optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui realisasi pajak daerah yang melebihi target (103,86% pada 2011, 115,21% pada 2012, dan 112,62% pada 2013) dan realisasi belanja tidak langsung yang mencapai 96 persen serta belanja langsung mencapai 86-92 persen dari anggaran yang ditetapkan.

Namun, mulai periode tahun 2014 hingga 2020, efektivitas anggaran belanja Kota Makassar mengalami penurunan menjadi sekitar 80,09 hingga 89,88 persen, meskipun masih tergolong cukup efektif. Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal dan internal yang saling terkait. Secara eksternal, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang rendah, sehingga membatasi ruang fiskal untuk pembiayaan belanja modal. Secara internal, adanya kendala dalam pelaksanaan program atau perubahan kebijakan anggaran

yang mengakibatkan realisasi anggaran tidak mencapai target yang direncanakan.

Selanjutnya, pada periode 2021 hingga 2022, tingkat efektivitas menurun lebih signifikan, yaitu berada pada kisaran 75 persen, yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa pos belanja pada belanja langsung mengalami penurunan realisasi mencapai 72 persen dari anggaran yang di targetkan, seperti belanja modal hanya berada pada kisaran 45 hingga 48 persen dari target yang direncanakan. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada keterbatasan aktivitas pembangunan serta realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada masa tersebut belum berjalan optimal sesuai perencanaan awal. Memasuki tahun 2023 dan 2024, efektivitas anggaran mulai menunjukkan perbaikan dengan capaian masing-masing 85,66 persen dan 80,67 persen, yang kembali masuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran setelah masa pandemi, meskipun belum mencapai tingkat efektivitas tertinggi seperti pada awal periode pengamatan.

Secara keseluruhan, efektivitas penggunaan anggaran belanja Kota Makassar selama periode 2011-2024 menunjukkan fluktuasi dengan tren yang cenderung menurun, meskipun masih berada dalam kategori cukup efektif. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran yang perlu diatasi agar sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan kualitas perencanaan anggaran serta pengawasan yang ketat dalam proses pelaksanaan. Dengan demikian, realisasi belanja dapat dioptimalkan sehingga berkontribusi secara maksimal pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan efektivitas anggaran juga penting untuk memastikan alokasi dana sesuai prioritas pembangunan sekaligus meminimalkan pemborosan atau kegiatan yang kurang produktif.

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Belanja Daerah Kota Makassar
Periode 2011-2024

| Tahun | Efektivitas | | Rasio Efektivitas | Keterangan |
|-----------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| | Anggaran Belanja | Realisasi Anggaran Belanja | | |
| 2011 | 1,876,044,800,000.00 | 1,711,878,129,986.00 | 91.25 | efektif |
| 2012 | 2,094,189,500,000.00 | 1,996,706,001,524.00 | 95.35 | efektif |
| 2013 | 2,497,955,910,000.00 | 2,335,016,785,370.00 | 93.48 | efektif |
| 2014 | 2,957,754,417,000.00 | 2,606,083,333,328.00 | 88.11 | cukup efektif |
| 2015 | 3,475,894,752,000.00 | 3,062,274,393,637.00 | 88.10 | cukup efektif |
| 2016 | 3,905,887,927,000.00 | 3,278,340,966,082.00 | 83.93 | cukup efektif |
| 2017 | 3,686,860,860,000.00 | 3,313,623,623,887.00 | 89.88 | cukup efektif |
| 2018 | 4,089,589,897,000.00 | 3,526,081,002,897.00 | 86.22 | cukup efektif |
| 2019 | 4,177,333,479,400.00 | 3,549,123,220,749.00 | 84.96 | cukup efektif |
| 2020 | 3,708,157,175,170.00 | 2,969,786,003,772.00 | 80.09 | cukup efektif |
| 2021 | 4,165,165,032,351.00 | 3,150,496,728,994.00 | 75.64 | kurang efektif |
| 2022 | 4,700,694,460,499.00 | 3,549,062,984,209.00 | 75.50 | kurang efektif |
| 2023 | 5,262,232,822,463.00 | 4,507,727,571,970.00 | 85.66 | cukup efektif |
| 2024 | 5,291,666,294,721.00 | 4,268,799,980,997.00 | 80.67 | cukup efektif |
| Rata-rata | 3,706,387,666,257.43 | 3,130,357,194,814.43 | 85.63 | cukup efektif |

Sumber data: *BPKAD Kota Makassar (Data diolah, 2025)*

Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4 tingkat efisiensi anggaran belanja Kota Makassar selama periode 2011-2024, diperoleh rata-rata rasio efisiensi sebesar 58,53 persen, yang secara umum termasuk dalam kategori sangat efisien. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah mampu melaksanakan kegiatan pembangunan dengan penggunaan anggaran yang relatif hemat dan terkendali dibandingkan dengan realisasi belanja keseluruhan.

Pada periode 2011 hingga 2016, rasio efisiensi berada pada kisaran 45,26 hingga 59,05 persen, yang seluruhnya tergolong sangat efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada periode tersebut berjalan dengan baik, di mana biaya operasional dan belanja tidak langsung masih proporsional terhadap total belanja daerah yang meningkat dari Rp1,711 triliun 2011, menjadi Rp3,278 triliun tahun 2016.

Memasuki tahun 2017 hingga 2019, efisiensi anggaran sedikit menurun ke kisaran 67,45 hingga 69,68 persen, yang termasuk kategori efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan proporsi belanja langsung terhadap total belanja daerah, di mana realisasi belanja langsung mencapai Rp2,235 triliun 2017 hingga Rp2,473 triliun 2019, disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas dan kegiatan pembangunan fisik. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pelaksanaan program dan efisiensi penggunaan anggaran

Pada periode 2020 hingga 2024, tingkat efisiensi fluktuatif dengan kisaran 51,24 hingga 68,32 persen, di mana 2020-2021 tergolong sangat efisien 51,24-54,42% dan 2022-2024 efisien 60,71-68,32%. Peningkatan efisiensi pada periode 2020-2021 disebabkan oleh penggunaan anggaran belanja modal yang rendah, hanya Rp291 miliar hingga Rp322 miliar atau sekitar 48% dari anggaran yang ditetapkan, hal ini tentu dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penundaan proyek infrastruktur dan refokus alokasi ke program kesehatan serta bantuan sosial mendesak, dengan realisasi belanja langsung Rp1,521 triliun tahun 2020, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma & Budiwitjaksono², 2023) Tingkat efisiensi terendah pada tahun 2020 dengan presentase sebesar 40,93%, hal ini dikarenakan belanja modal yang dilakukan pemerintah lebih rendah dari pada periode sebelumnya. sementara pada tahun 2021 hingga 2023 tingkat efisiensi Kota Makassar tergolong efisien yang disebabkan oleh peningkatan di beberapa pos belanja seperti belanja jasa kantor yang mencapai Rp749 miliar, belanja perjanan dinas Rp238 miliar dan belanja habis pakai Rp395 miliar pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja Kota Makassar selama 2011-2024 tergolong sangat efisien, dengan hanya enam tahun 2017-2019, 2022-2024 pada kategori efisien. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur alokasi sumber daya fiskal secara optimal untuk mendukung pembangunan tanpa pemborosan. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar stabil dan terjaga sepanjang periode, meskipun ada fluktuasi ringan.

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Kota Makassar
Periode 2011-2024

| Tahun | Efisiensi | | Rasio Efisiensi | Keterangan |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|
| | Realisasi Belanja | Realisasi Belanja Langsung | | |
| 2011 | 1,711,878,129,986.00 | 774,834,782,838.00 | 45.26 | sangat efisien |
| 2012 | 1,996,706,001,524.00 | 999,590,584,037.00 | 50.06 | sangat efisien |
| 2013 | 2,335,016,785,370.00 | 1,167,196,913,789.00 | 49.99 | sangat efisien |
| 2014 | 2,606,083,333,328.00 | 1,440,616,175,235.00 | 55.28 | sangat efisien |
| 2015 | 3,062,274,393,637.00 | 1,808,183,062,671.00 | 59.05 | sangat efisien |
| 2016 | 3,278,340,966,082.00 | 1,934,785,852,824.00 | 59.02 | sangat efisien |
| 2017 | 3,313,623,623,887.00 | 2,234,994,844,823.00 | 67.45 | efisien |
| 2018 | 3,526,081,002,897.00 | 2,400,203,586,070.00 | 68.07 | efisien |
| 2019 | 3,549,123,220,749.00 | 2,472,856,927,806.00 | 69.68 | efisien |
| 2020 | 2,969,786,003,772.00 | 1,521,641,679,152.00 | 51.24 | sangat efisien |
| 2021 | 3,150,496,728,994.00 | 1,714,497,209,205.00 | 54.42 | sangat efisien |
| 2022 | 3,549,062,984,209.00 | 2,160,812,156,888.00 | 60.88 | efisien |
| 2023 | 4,507,727,571,970.00 | 3,079,577,145,502.00 | 68.32 | efisien |
| 2024 | 4,268,799,980,997.00 | 2,591,386,855,664.00 | 60.71 | efisien |
| Rata-rata | 3,130,357,194,814.43 | 1,878,655,555,464.57 | 58.53 | sangat efisien |

Sumber data: *BPKAD Kota Makassar (Data diolah, 2025)*

Uji Korelasi Rank Spearman

Hasil analisis korelasi Spearman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Rank Spearman

| Variabel | | | Efektivitas | Efisiensi | Pertumbuhan Ekonomi |
|----------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------------|
| Spearman's rho | Efektivitas | Correlation | 1.000 | -.354 | .648* |
| | | Coefficient | | | |
| | | Sig. (2-tailed) | . | .215 | .012 |
| | | N | 14 | 14 | 14 |
| | Efisiensi | Correlation | -.354 | 1.000 | .090 |
| | | Coefficient | | | |
| | | Sig. (2-tailed) | .215 | . | .759 |
| | | N | 14 | 14 | 14 |
| | Pertumbuhan Ekonomi | Correlation | .648* | .090 | 1.000 |
| | | Coefficient | | | |
| | | Sig. (2-tailed) | .012 | .759 | . |
| | | N | 14 | 14 | 14 |

Sumber: *Hasil Olah Data SPSS 25, (2025)*

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman's rho, hubungan antara efektivitas anggaran dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,648 dengan nilai signifikansi 0,012 ($p < 0,05$), yang mengindikasikan adanya hubungan yang kuat dan signifikan. Sementara itu, hubungan antara efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien korelasi sebesar 0,090 dengan nilai signifikansi 0,759 ($p > 0,05$), menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan

Pembahasan

Korelasi Efektivitas Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa variabel efektivitas belanja daerah memiliki hubungan yang kuat dan signifikan secara statistik dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan positif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi efektivitas belanja pemerintah daerah, semakin besar pula peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Hubungan positif ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi. Efektivitas anggaran mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Ketika anggaran digunakan secara efektif, berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dukungan terhadap sektor-sektor produktif dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan PDRB (Tobing et al., 2025).

Menariknya, hubungan yang signifikan ini muncul meskipun komposisi belanja lebih didominasi oleh belanja operasional, seperti belanja jasa kantor, belanja habis pakai, dan perjalanan dinas. Pada tahun 2023, misalnya, realisasi belanja operasional sebesar Rp4,04 triliun atau 85,64 persen dari anggaran yang ditetapkan, lebih besar dibandingkan dengan belanja modal yang hanya sebesar Rp1,13 triliun atau 77,47 persen dari anggaran yang ditetapkan. Secara teoritis, belanja modal biasanya menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi karena memiliki efek pengganda yang tinggi (Dalimunthe & Hasri, 2023). Namun, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas yang tinggi pada belanja operasional justru berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal ini dapat dijelaskan karena efektivitas tidak mengukur jenis belanja, tetapi mengukur seberapa baik anggaran yang direncanakan berhasil direalisasikan. Dengan kata lain, meskipun sebagian besar belanja diarahkan pada pos operasional, efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengeksekusi anggaran secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai rencana, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar (Anita, 2024). Kelancaran pelayanan publik dan kegiatan operasional pemerintah tetap dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian melalui peningkatan perputaran uang, peningkatan permintaan jasa, serta aktivitas birokrasi yang mendukung iklim usaha (Hasibuan et al., 2025).

Tingginya tingkat efektivitas belanja mencerminkan bahwa pemerintah daerah mampu menjalankan program pembangunan secara konsisten, bahkan pada pos belanja rutin dan operasional (Putri & Yuliafitri, 2024). Berdasarkan laporan realisasi anggaran, peningkatan realisasi pada komponen belanja langsung seperti bahan habis pakai, jasa kantor, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan pelatihan sejak tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat arus aktivitas ekonomi yang tetap bergerak, baik melalui pembelian barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, maupun peningkatan kapasitas ASN. Aktivitas ini memicu permintaan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian dan memberikan dampak tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun dampak tersebut tidak sebesar belanja modal (Pusporini, 2020).

Sejalan dengan penelitian dilalukan oleh (Simanjuntak et al., 2025) hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja langsung dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penelitian yang dilakukan oleh (Rumbia et al., 2022) hasil penelitian menunjukkan peningkatan realisasi belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi dan realisasi pada belanja daerah dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan jasa serta penguatan kapasitas produksi. Dengan demikian, kualitas pengelolaan dan penyerapan belanja langsung maupun belanja modal menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Temuan ini sesuai dengan pandangan Adam Smith yang menekankan pentingnya peningkatan produktivitas dan kelancaran aktivitas ekonomi dalam mendorong pertumbuhan. Belanja pemerintah yang efektif mampu menjaga stabilitas layanan publik dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, teori Harrod-Domar menegaskan bahwa investasi pemerintah-termasuk dalam bentuk peningkatan kapasitas birokrasi, pemeliharaan sarana, serta penyediaan layanan publik dapat meningkatkan kemampuan produksi ekonomi secara bertahap, sekalipun bukan melalui pembangunan fisik semata, sejalan dengan teori ekonomi Keynesian yang menyatakan bahwa belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Ketika belanja pemerintah direalisasikan secara efektif, maka pendapatan masyarakat meningkat, kesempatan kerja bertambah, dan kegiatan ekonomi menjadi lebih dinamis. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, efektivitas belanja yang tinggi tetap mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun porsi belanja modal lebih rendah. Faktor yang membuat hubungan ini tetap signifikan adalah keberhasilan pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh anggaran, termasuk belanja operasional, direalisasikan secara optimal dan memberikan dampak multiplier terhadap aktivitas ekonomi daerah. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas belanja baik produktif maupun operasional tetap menjadi indikator penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Korelasi Efisiensi Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa efisiensi belanja daerah tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar selama periode penelitian. Artinya, upaya pemerintah daerah dalam melakukan penghematan atau menekan pemborosan anggaran belum mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PDRB.

Hasil ini mengisyaratkan bahwa efisiensi anggaran tidak selalu sejalan dengan peningkatan produktivitas ekonomi. Dalam praktiknya, efisiensi seringkali berkaitan dengan penurunan atau pengendalian belanja, sehingga penyerapan anggaran justru menjadi rendah. Kondisi ini dapat menyebabkan output pembangunan menjadi kurang optimal. Dengan demikian, efisiensi yang terlalu tinggi tidak selalu mencerminkan kinerja pembangunan yang baik, terutama jika terjadi pada belanja yang seharusnya bersifat produktif atau memiliki efek pengganda tinggi terhadap perekonomian daerah (Yuliati, 2025).

Menurut data laporan realisasi belanja langsung periode tahun 2023 Kota Makassar memperlihatkan adanya peningkatan pada beberapa pos belanja yang menjadi sasaran kebijakan efisiensi pada tahun 2025, seperti belanja bahan habis pakai yang mencapai Rp395 miliar, lebih besar sebesar Rp74 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp321 miliar.

Rincian tersebut terdiri dari belanja alat tulis kantor sebesar Rp22,1 miliar dan makan serta minum rapat sebesar Rp36,5 miliar. Selanjutnya, belanja jasa kantor mencapai Rp749 miliar, yang terdiri dari honorarium narasumber sebesar Rp38 miliar dan honorarium tim pelaksana kegiatan sebesar Rp23 miliar. Selain itu, belanja perjalanan dinas mencapai Rp238 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp175 miliar.

Meskipun terdapat peningkatan pada pos-pos belanja operasional tersebut, kenaikan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan masih lebih berfokus pada pengendalian pengeluaran operasional, bukan pada peningkatan kualitas dan produktivitas belanja secara keseluruhan. Dari laporan Realisasi belanja daerah, belanja modal pada tahun 2023 mencapai Rp1,13 triliun, atau hanya 77,4 persen dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan total realisasi belanja langsung, belanja modal hanya mencapai sekitar 43 persen yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin Rp385 miliar, belanja gedung dan bangunan sebesar Rp237 miliar, kemudian belanja jalan, jaringan dan irigasi Rp486 miliar. Meskipun nominal realisasi belanja modal cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut justru hanya mencapai 5,3 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,4 persen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja produktif belum sepenuhnya menghasilkan efek pengganda (*multiplier effect*) yang optimal terhadap perekonomian, seperti pembangunan infrastruktur dan investasi jangka Panjang.

Namun demikian, meskipun porsi belanja modal relatif besar pada tahun 2023, masih terdapat alokasi signifikan pada belanja non-produktif atau operasional yang perlu dioptimalkan agar anggaran benar-benar berfokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, efisiensi anggaran sebaiknya diarahkan pada pengurangan belanja operasional yang kurang produktif, sehingga prioritas pada belanja modal sebagai motor utama pembangunan dapat dijalankan secara maksimal (Simanjuntak et al., 2025).

Dari periode penelitian, realisasi belanja modal rata-rata hanya mencapai sekitar 18 persen dari total realisasi anggaran belanja. Kondisi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja modal masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan investasi yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Rendahnya porsi belanja modal dapat menjadi salah satu faktor yang membatasi potensi peningkatan infrastruktur dan pengembangan kapasitas produksi daerah. Oleh karena itu, peningkatan proporsi belanja modal perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Zulkarnain & Wiriani, 2019).

Perbandingan ini menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan belum diarahkan secara tepat untuk memperkuat belanja produktif, sehingga tidak mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penerapan efisiensi perlu mempertimbangkan komposisi dan kualitas belanja, bukan sekadar menekan angka pengeluaran, agar efisiensi yang dilakukan benar-benar mendorong pembangunan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Temuan ini konsisten dengan teori Keynesian yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih dipengaruhi oleh belanja pemerintah yang produktif, bukan sekadar belanja yang efisien. Sementara itu, teori pertumbuhan Solow menegaskan pentingnya akumulasi modal dan

peningkatan produktivitas sebagai pendorong pertumbuhan jangka panjang, yang tidak dapat dicapai hanya melalui penghematan anggaran.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan (Putra, 2020) Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara efisiensi anggaran dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Demikian pula, penelitian (Andriani, 2017) Penelitian menemukan bahwa skor efisiensi belanja pemerintah daerah di Jawa Barat dan Sumatera Utara memiliki korelasi positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi skor efisiensi belanja, semakin besar pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konteks spesifik Kota Makassar, seperti rendahnya realisasi belanja modal dan dominasi belanja non-produktif, kemungkinan membatasi pengaruh efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 secara eksplisit menekankan perlunya percepatan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Inpres ini menggarisbawahi bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, tepat waktu, dan menghasilkan output maksimal. Prinsip tersebut menegaskan bahwa efisiensi harus berjalan seiring produktivitas belanja untuk memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil empiris penelitian ini, efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Implementasi efisiensi di tingkat daerah perlu diperbaiki, khususnya dalam memastikan penghematan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik dan output pembangunan. Pemerintah daerah harus mengarahkan efisiensi sebagai strategi peningkatan kualitas belanja melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sesuai prinsip Inpres No. 1 Tahun 2025, agar setiap rupiah anggaran memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, efektivitas belanja daerah terbukti berkorelasi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, sedangkan efisiensi belanja tidak menunjukkan korelasi yang berarti, efektivitas yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah merealisasikan program pembangunan tepat waktu dan tepat sasaran sehingga mendorong aktivitas ekonomi, sementara upaya efisiensi yang lebih banyak diarahkan pada penghematan belanja operasional cenderung menekan alokasi belanja produktif seperti belanja modal sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi terbatas. Kelemahan penelitian ini meliputi cakupan yang terbatas pada Kota Makassar, rentang waktu data yang relatif singkat, dan penggunaan metode korelasi yang tidak dapat membuktikan hubungan kausal secara definitif. Dengan mempertimbangkan temuan dan keterbatasan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan porsi dan kualitas belanja produktif serta mengarahkan efisiensi pada pengurangan belanja non-esensial tanpa mengorbankan output pembangunan, dan untuk penelitian selanjutnya direkomendasikan memperluas cakupan spasial dan temporal serta menambahkan variabel kontrol seperti kualitas tata kelola, investasi, dan indikator sosial-ekonomi agar analisis menjadi lebih komprehensif dan mampu menguji hubungan kausal.

REFERENSI

- Andriani, T. (2017). Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2004-2013. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 11(1), 83–95.
- Anita, D. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(4), 2457–2466.
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149–167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- Dalimunthe, Z., & Hasri, D. A. (2023). ANALISIS MULTIPLIER EFFECT INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016-2020. *Nusantara Journal of Economics*, 05(1), 2714–5204.
- Fithri Ayu, E., & Yulistia. (2020). Efficiency dan Effectiveness of Budget To Measure Financial Performance on Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Durian Tarung Padang. *Pareso Jurnal*, 2(4), 387–396.
- Haryono, R., Lanadimulya, H., & Farhan, M. H. (2021). Peran Teknologi dan Modal Manusia dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.23969/jrie.v1i2.11>
- Hasibuan, F. H., Siagian, K. F., & Zein, A. W. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(12), 481–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683326>
- Hidayat, A. S., & Nalle, F. W. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(01), 71–86.
- Hutahaean, P. (2019). Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Analisis Kointegrasi dan Kausalitas. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 103–115. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i2.411>
- Irasriadipura, I., Rahayu, S., & Junaidi, J. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhanekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 82–92. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.16267>
- Ismail, priyono zaenudin. (2012). Teori Ekonomi. In *Dharma Ilmu* (pp. 275–280). <https://doi.org/10.4337/9781843768715.00061>
- Juli, V. N., Haryati, D. C., Masitoh, G., Saputra, W., & Subarkah, T. (2025). Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia : Pendekatan Data Panel pertumbuhan ekonomi , namun belum banyak yang menganalisis aspek efisiensinya .
- Kartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* 7 (2019) 147-153, 7, 147–153.
- Khaira, F., Umar, Z., Gadeng, T., & Yola, C. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pangan Aceh Tahun 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 12(2). <https://doi.org/10.37598/jam.v12i2.1618>
- Kusuma, R. hadi, & Budiwitjaksono2, G. S. (2023). EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(2), 1703–1711. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6115>
- Lutfi, I. A., Safitri, D. E., Rukmanawati, M., Anwar, S., & Kabib, N. (2020). Evaluasi Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Periode 2016-2018. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, 7(1), 79–86.

- <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v7i1.309>
- Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 105–113. <https://doi.org/10.51510/jakp.v5i2.986>
- Pusporini, I. D. (2020). Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 485. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i06.p01>
- Putra, W. (2020). Efisiensi Anggaran Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 41–55.
- Putri, R. M., & Yuliafitri, I. (2024). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2019-2022 (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Kota Bandung). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.55606/optimal.v4i1.2586>
- Ramadani, A., & Arfida, B. R. (2017). Analisis Efisiensi Usaha Mikro Kecil Menengah Gula Merah Di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(1), 44–60.
- Rumbia, N., Urip, T. P., & Indahyani, R. (2022). Analisis Hubungan Realisasi Pendapatan Daerah Dan Realisasi Belanja Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura Tahun 2003-2013. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 2(2). <https://doi.org/10.56076/jkesp.v2i2.2062>
- Simanjuntak, G. Y., Yulika, M., Putri, D. N., & Pangestoeti, W. (2025). PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(6), 260–273. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5158>
- Sinaga, B. K., Buulolo, M., Utami, D., Ichwani, A. T., & Pane, S. G. (2024). Pengaruh Model-Solow Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 709–716. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i2.3331>
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63–78.
- T, N. A., G, K. A., & Agustinus, M. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisieni*, 23(7), 145–156.
- Tobing, L. M. L., Ramadani, N. A., & Djou, M. N. A. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ekonomi Daerah. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 297–306. <https://doi.org/10.62017/syariah.v2i4.5075>
- Tuju, E. F., Manossoh, H., & N Wokas, H. R. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 185–196.
- Wau, M., Wati, L., & Fau, J. F. (2022). Teori Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual Dan Empirik). *Eureka Media Aksara*, 1–73.
- Yuliati, D. (2025). DAMPAK KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN DI BAPPEDA PROVINSI NTB : IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 32–42. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.206>
- Zulkarnain, M., Wiriani, E., & Astuti, Y. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, 3(1), 65–73.